



A.Junaedi Karso

SECUIL FAKTA PERBEDAAN **KUHP BARU** DENGAN **KUHP LAMA** & KESIAPAN APH SELAKU EKSEKUTOR NEGARA



SECUIL FAKTA PERBEDAAN KUHP BARU DENGAN KUHP LAMA & KESIAPAN APH SELAKU EKSEKUTOR NEGARA



A Junaedi Karso lahir di Indramayu, pada 20 September 1975. Pendidikan formalnya S1 FIH Indramayu (lulus tahun 2006), S2 FIP Tangerang (lulus tahun 2008), S2 FH USU Medan (lulus tahun 2020) dan S3 FIP Jakarta (lulus tahun 2017); Pendidikan Non Formal meliputi Mengetik Manual di Mars College Jakarta tahun 1995, Mengetik IBM di Mars College Jakarta tahun 1996, Komputer di Mars College Jakarta tahun 1996, Akutansi Bon A Bon B di PKBMN Jakarta tahun 1997, Beginner Course di

PKBMN Jakarta tahun 1996, *Free Elementary* di PKBMN Jakarta tahun 1996, *Elementary One* di PKBMN Jakarta tahun 1996, *Elementary Two* di PKBMN Jakarta tahun 1996, *Intermedite One* di PKBMN Jakarta tahun 1998, *Intermedite Two* di PKBMN Jakarta tahun 1998, *Advance* di PKBMN Jakarta tahun 1998, *Conversation* di Mars College Jakarta tahun 1996, dan Perpajakan di Dirjen Pajak Jakarta tahun 2010.

SECUIL FAKTA PERBEDAAN KUHP BARU DENGAN KUHP LAMA & KESIAPAN APH SELAKU EKSEKUTOR NEGARA

A.Junaedi Karso



eureka
media aksara

PENERBIT CV. EUREKA MEDIA AKSARA

**SECUIL FAKTA PERBEDAAN KUHP BARU DENGAN KUHP
LAMA & KESIAPAN APH SELAKU EKSEKUTOR NEGARA**

Penulis : A.Junaedi Karso

Desain Sampul : Aqna Tsaqiful Umana

Tata Letak : Melia Hasna Salsabiila

ISBN : 978-634-271-534-5

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, MARET 2026**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi:

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2026

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bismillahirrohmanirohim

Segala Puji dan Syukur kami panjatkan selalu kepada “Allah SWT” atas Rahmat, Taufiq, dan Hidayah yang sudah diberikan sehingga kami bisa menyelesaikan Buku tentang “*Secuil Fakta Perbedaan KUHP Baru dengan KUHP Lama & Kesiapan APH Selaku Eksekutor Negara*”.

Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kutip atau salah menorehkan sumber-sumber buku terkait “*Secuil Fakta Perbedaan KUHP Baru dengan KUHP Lama & Kesiapan APH Selaku Eksekutor Negara*” ini.

Kami sadar bahwa penulisan buku ini bukan merupakan buah hasil kerja keras kami sendiri, tulisan ini kami kutif, lansir dari berbagai sumber baik dari Ahi, buku, Artikel, jurnal, media *online* misalnya: kompas.id, <https://www.tempo.co>, *google website*, misalnya: hukumonline.com, dandapala.com, mahkamahagung.go.id, kejaksaan.go.id, humas.polri.go.id, tribatanews.polri.go.id, kompas.id, <https://www.tempo.co>, bphn.go.id, indonesiabaik.id, reformasikuhp.org, suarabsdk.com, jurnalmediasukses.com, literasihukum.com, most1058fm.com, dst. serta sumber-sumber lainnya.

Dalam hal ini dengan kami sampaikan banyak pihak yang sudah berjasa dalam membantu kami di dalam menyelesaikan buku ini, seperti pengambilan data, pemilihan contoh, dan lain-lain. Maka dari itu, kami mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan wawasan dan bimbingan kepada kami sebelum maupun ketika menulis buku panduan ini.

Akhirnya, kami berterima kasih kepada semua pihak, yang tidak bisa kami sebutkan satu per satu yang turut serta membidani kelahiran buku ini. Semoga “Allah SWT” membalas kebaikan Anda-Anda semua. Selamat membaca dan semoga bermanfaat.

Nasrun Minallah Wa Fathum Qarib

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB 1 KUHP BARU BERLAKU DI INDONESIA	1
A. KUHP Baru Karya Anak Negeri Berlaku	1
B. Kontroversi dan Kritik Masyarakat.....	6
C. KUHP Baru Menggantikan KUHP Lama.....	11
D. Bentuk-Bentuk Transformasi dalam Penegakan Hukum Pidana.....	18
BAB 2 REKODEFIKASI KUHP NASIONAL	22
A. Pembaruan KUHP di Indonesia.....	22
B. Pengesahan dan Periodisasi KUHP.....	31
C. KUHP Belanda-KUHP Nasional.....	41
D. Integrasi <i>Core Crimes</i> dalam KUHP Nasional	60
BAB 3 PERBANDINGAN UTAMA KUHP LAMA DAN KUHP BARU	70
A. KUHP Lama dan Baru	70
B. Disyahnannya KUHP Baru	71
C. Kodifikasi Ulang KUHP	78
D. Asas Legalitas Pilar di KUHP Lama dan Baru	89
E. Mengenal Jenis-Jenis Pemidanaan dalam KUHP Nasional	96
F. Perbedaan Mendasar KUHP Lama dengan KUHP Terbaru.....	100
BAB 4 WEWENANG APH SEBAGAI EKSEKUTOR PENEGAK HUKUM BERDASARKAN KUHP DAN KUHAP BARU	108
A. Aparatur Penegak Hukum.....	108
B. Wewenang Polri Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022.....	115
C. APH Terapkan KUHAP dan KUHP Baru.....	123
DAFTAR PUSTAKA.....	185
TENTANG PENULIS	194
LAMPIRAN	203

BAB

1

KUHP BARU BERLAKU DI INDONESIA

A. KUHP Baru Karya Anak Negeri Berlaku

1. Pengesahan KUHP Baru

Jakarta-Rapat Paripurna ke-8 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025–2026 di Gedung DPR RI Jakarta pada Selasa, 18 November 2025, resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHP) menjadi Undang-undang (UU). Sidang yang dimulai pukul 10.00 WIB itu dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani dan dihadiri 242 anggota dewan. Seluruh fraksi menyatakan persetujuan melalui musyawarah, sehingga regulasi yang telah dibahas panjang itu ditetapkan sebagai undang-undang¹. berlaku mulai 2 Januari 2025

Sejumlah **pembaruan penting dalam KUHP Nasional, di antaranya:**

- a. Penghapusan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran, yang kini disatukan dalam istilah tindak pidana.
- b. Pengaturan yang lebih jelas mengenai gugurnya kewenangan penuntutan dan pelaksanaan pidana.

¹ Urif Syarifudin, DPR Sahkan KUHP Baru dalam Rapat Paripurna ke-8, <https://dandapala.com>, diakses ulang pada tanggal 22 Januari 2026

BAB 2

REKODEFIKASI KUHP NASIONAL

A. Pembaruan KUHP di Indonesia

1. Rekodifikasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Sejak puluhan tahun silam, upaya rekodifikasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) nasional sebenarnya sudah digagas⁵. Tepatnya, saat digelar Seminar Hukum Nasional I di Semarang pada 1963, salah satunya membahas Rancangan KUHP (RKUHP) selain Rancangan KUHP KUHPPerdata, KUHPDagang. Seminar ini disebut-sebut menjadi titik awal sejarah pembaruan KUHP di Indonesia yang setahun kemudian mulai dirumuskan oleh tim pemerintah⁶.

Sebab, substansi RKUHP yang ada saat ini sebagian masih mengacu hasil seminar tersebut diantaranya menambahkan ataupun perluasan delik-delik (tindak pidana) kejahatan keamanan negara (kejahatan ideologi); delik ekonomi; hukum adat (*living law*); delik kesusilaan. Beberapa tahun terakhir, diadopsinya delik korupsi; delik penyebaran kebencian terhadap pemerintah; penghinaan kepala negara (presiden); contempt of court; kualifikasi delik

⁵ Karso, A.Junaedi (2026). Selamat Datang Kuha & Kuha Baru Selamat Tinggal Warisan Hukum Kolonial Belanda, Penerbit Samudra Biru, Bantul, DI Yogyakarta 55198, h.5-7

⁶ Sekilas Sejarah dan Problematika Pembahasan RKUHP, <https://reformasikuhp.org>, diakses ulang pada tanggal 22 Januari 2026

BAB 3

PERBANDINGAN UTAMA KUHP LAMA DAN KUHP BARU

A. KUHP Lama dan Baru

Perbedaan KUHP Lama dan Baru

Perbedaan KUHP Lama dan Baru ²⁰ terletak pada pergeseran paradigma dari represif (pembalasan) ke restoratif (pemulihan), memperluas asas legalitas (menerima *living law*), menguatkan HAM, mengatur pidana perusahaan & siber, serta fokus pada rehabilitasi pelaku dan perlindungan korban, tidak hanya menghukum, dengan tujuan menciptakan keadilan substantif yang lebih humanis dan adaptif terhadap perubahan zaman.

Perbandingan Utama KUHP Lama dan KUHP Baru

1. Filosofi & Asas

- a. **KUHP Lama:** Represif, pembalasan (*retributif*), fokus pada penghukuman.
- b. **KUHP Baru:** Restoratif & korektif, pemulihan keseimbangan sosial, perlindungan HAM, rehabilitasi pelaku, keadilan substantif.

2. Asas Legalitas

- a. **KUHP Lama:** Formal (*hanya hukum tertulis*), melarang analogi.

²⁰ Karso, A.Junaedi (2026). Selamat Datang KUHP & KUHP Baru Selamat Tinggal Warisan Hukum Kolonial Belanda, Penerbit Samudra Biru, Bantul, DI Yogyakarta 55198, h. 161-163

BAB 4

WEWENANG APH SEBAGAI EKSEKUTOR PENEGAK HUKUM BERDASARKAN KUHP DAN KUHP BARU

A. Aparatur Penegak Hukum

1. Kesiapan Aparat Penegak Hukum

Kesiapan aparat penegak hukum (APH) sebagai eksekutor penegak hukum dalam menerapkan KUHP dan KUHP baru menjadi isu krusial menjelang pemberlakuan penuh, dengan berbagai pihak (DPR, Wamenkumham) menyoroti perlunya pelatihan masif, sosialisasi, dan sinkronisasi peraturan pelaksana untuk menghindari multiinterpretasi dan penyimpangan, mengingat tantangan perubahan paradigma dari pidana retributif ke pidana restoratif yang menuntut transparansi, profesionalitas, integritas, dan pemahaman mendalam akan hak asasi manusia serta pendekatan sosiologis/psikologis, agar hukum benar-benar adil dan efektif berdasarkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pengertian Aparatur Penegak Hukum

APH adalah singkatan yang memiliki dua arti utama: Aparat Penegak Hukum (Polisi, Jaksa, Hakim, dll.) yang bertugas menegakkan hukum, dan Agen Pengendali Hayati (mikroorganisme seperti bakteri atau jamur) yang digunakan untuk mengendalikan hama dan penyakit tanaman secara alami, sebagai alternatif pestisida kimia. Konteks penggunaannya akan menentukan makna APH yang dimaksud, baik di bidang hukum maupun pertanian.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Pradnya Paramita, Jakarta. 1993
- Anwar, dkk. "Eksistensi dan Perluasan Asas Legalitas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP." JIS Pendorong (2025).
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016.
- Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2022.
- Ashworth, Andrew. "*Sentencing and Criminal Justice*." Cambridge University Press, 2005.
- Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*. Bandung: Kencana, 2020.
- Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Undip, Semarang. 1996.
- Bemmelen, 1984, *Hukum Pidana I*, Banacipta.
- D. Y. Witanto, *Hukum Acara Praperadilan dalam Teori dan Praktik*. Depok: Imaji Cipta Karya, 2019.
- Didi Widayadi, *Trend Bisnis Curang di Indonesia*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1995
- Edward Omar Sharif Hiarij, Pernyataan dalam Kuliah Umum Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengenai pembaruan hukum pidana dan penafsiran hukum, disampaikan dalam forum akademik pada tahun 2023.

- Egbert Myjer *et. al.*, *Standards for Prosecutors: An Analysis of the United Kingdom National Prosecuting Agencies*, International Association of Prosecutors, Wolf Legal Publishers, the Hague, 2009.
- H. Kuffal, *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*. Malang: UMM.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Harahap, M. Yahya. (2010). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Indonesia Judicial Research Society (IJRS). *Legal Opinion: Mengurai Benang Kusut Hukum yang Hidup di Masyarakat dalam KUHP*. (2025).
- J.H.A. Logemann. *Tentang Teori Suatu hukum Tata Negara Positif, Terjemahan Makkatutu dan JC Pangkarego*. Ichtiar Baru Van hoeve. 1975.
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Judicial Pardon sebagai Wujud Humanisasi Pidana dalam KUHP 2023. JOECY (2024/2025).
- Karso A. Junaedi *Peran, Fungsi, Kedudukan Kepolisian Dalam Pemerintahan, Penegakan Hukum Dan Kolaborasi Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*, Zahir Publishing Yogyakarta 2020
- Karso, A. Junaedi), *TNI Anak Kandung Rakyat, Menjaga Keamanan Kejaksaan Solus Populus Supreme Lex Asto & Astacita Prabowo*, Penerbit CV. Eureka Media Aksara, Purbalinggo, Jawa Tengah, 2025.

- Karso, A. Junaedi, Kewenangan Kejaksaan Superbody, Membunuh Kewenangan POLRI-KPK, Penerbit CV. Eureka Media Aksara, Purbalinggo, Jawa Tengah, 2025.
- Karso, A. Junaedi. Revisi Undang-Undang Polri *Salus Populi Suprema Lex Esto*, Penerbit CV. Eureka Media Aksara, Purbalinggo, Jawa Tengah 2025.
- Karso, A.Junaedi. Selamat Datang KUHAP & KUHP Baru Selamat Tinggal Warisan Hukum Kolonial Belanda, Penerbit Samudra Biru, Bantul, DI Yogyakarta, 2026.
- Lawrence M. Friedman, The Legal System: A Social Science Perspective, New York: Russell Sage Foundation, 1975.
- M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Mahfud MD. Politik Hukum di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- Mahmud Yunus. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta, PT Hidakarya Agung, 1998, h. 196.
- Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia FH UI. "Buku Saku Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020." MaPPI FH UI, 2022.
- Mertokusumo, Sudikno. Penemuan Hukum. Yogyakarta: Liberty, 2009.
- Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- Muladi & Arief, Barda Nawawi. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni, 2021.
- Muladi. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2019.
- Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, 2008.*

Perluasan Objek Praperadilan Pasca KUHAP Baru Muhammad Yusril Hardiansyah (*National Taiwan University, Taiwan; PPI Dunia*)

Rahardjo, Satjipto. Hukum Progresif. Jakarta: Kompas, 2009.

Roeslan Saleh, *Tentang Tindak-Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, BPHN, Jakarta, 1984.

Ronald Dworkin, *Law's Empire*, Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1986;

Soetandyo Wignjosoebroto. Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya. Jakarta: Elsam, 2019.

Suhariyanto, Budi. "Pedoman Pemidanaan dalam Perspektif Reformasi Peradilan." Puslitbang Mahkamah Agung, 2020.

Teitel, Ruti G. *Transitional Justice*. Oxford: Oxford University Press, 2000.

Tinjauan Terhadap Asas Legalitas dan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat sebagai Dasar Pemidanaan Menurut UU No. 1/2023. Inovasi (2025).

Online

1 Januari 1918: Berlakunya KUHP Belanda di Nusantara, <https://dandapala.com>, diakses ulang pada tanggal 22 Januari 2026

Achmad Setyo Pudjoharsoyo, Perkara Transisi: Pasal Lama vs Pasal Baru KUHP, <https://marinews.mahkamahagung.go.id>, diakses ulang pada tanggal 22 Januari 2026

Achmad Setyo Pudjoharsoyo, Status Keberlakuan PERMA 1/2020 Setelah KUHP Nasional Berlaku, <https://marinews.mahkamahagung.go.id>, diakses pada tanggal 17 Januari 2026, diakses ulang pada tanggal 22 Januari 2026

Ady Thea DA, KUHAP Baru Beri Kewenangan Advokat Dampingi Klien Sejak Awal Pemeriksaan, <https://www.hukumonline.com>, diakses ulang pada tanggal 22 Januari 2026.

- Aji Prasetyo, KPK Lakukan Kajian Sesuaikan KUHP dan KUHP Baru, <https://www.hukumonline.com>, diakses ulang pada tanggal 22 Januari 2026
- Akbari Danico, KPK Pastikan Tetap Jalankan Tugas Penyidikan di Bawah KUHP-KUHAP Baru, <https://most1058fm.com>, diakses ulang pada tanggal 22 Januari 2026
- Anies Mahanani, Perbedaan Jenis Sanksi Pada KUHP Lama dan KUHP Baru, <https://medikolegal.id>, diakses ulang pada tanggal 22 Januari 2026
- Anies Mahanani, Perbedaan Mendasar KUHP Lama dengan KUHP Terbaru, <https://medikolegal.id>, diakses ulang pada tanggal 22 Januari 2026
- Argha Syifa Nugraha, Menelusuri 13 Perbedaan KUHP Lama dan KUHP Baru: Sebuah Kajian Komprehensif, <https://literasihukum.com>, diakses ulang pada tanggal 22 Januari 2026
- Bintoro Wisnu Prasajo, Integrasi Core Crimes Dalam KUHP Nasional: Analisis De Minimis Implikasinya, <https://dandapala.com>, diakses ulang pada tanggal 22 Januari 2026
- Hanifah Dwi Jayanti, Siap Terapkan KUHP dan KUHP Baru, Kejaksaan Terbitkan Panduan Masa Transisi, <https://www.hukumonline.com>, diakses ulang pada tanggal 22 Januari 2026
- Hidayat Salam, Aturan Polisi Jadi Penyidik Utama di KUHP Berlaku 2 Januari, Apa Saja Konsekuensinya, <https://www.kompas.id>, diakses ulang pada tanggal 22 Januari 2026
- Ibnu Abas Ali-Hakim, Pertautan Delik Korupsi dalam UU Tipikor dan KUHP Nasional 2023, <https://dandapala.com>, diakses ulang pada tanggal 22 Januari 2026

Kapolri dan Jaksa Agung Tandatangani Nota Kesepahaman Terkait dengan penerapan KUHP dan KUHP baru, <https://tribratanews.polri.go.id>, diakses ulang pada tanggal 22 Januari 2026

KUHP dan KUHP Berlaku 2 Januari 2026: Kontroversi dan Dampaknya bagi Masyarakat, <https://pendidikan-sains.fmipa.unesa.ac.id>, diakses ulang pada tanggal 22 Januari 2026

Mahkamah Agung Terbitkan SEMA Nomor 1 Tahun 2026, Jadi Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHP 2025, <https://www.jurnalmediasukses.com>, diakses ulang pada tanggal 22 Januari 2026

Marsudin Nainggolan, Pasal 603 KUHP Baru Sebagai Delicta Commune, Delik Materil, Modifikasi Sistem Delphi, dan Core Crime Pasal 2 Ayat (1) UU Tipikor, diakses ulang pada tanggal 22 Januari 2026

Mohammad Khairul Muqorobin, Sejarah Perkembangan dan masa depan KUHP di Indonesia, <https://marinews.mahkamahagung.go.id>, diakses ulang pada tanggal 22 Januari 2026

Nanda Narendra Putra, KUHP Baru Posisikan Delik Korupsi Bukan Lagi Extraordinary Crime, Bagaimana Nasib Pemberantasan Korupsi, <https://bphn.go.id>, diakses ulang pada tanggal 22 Januari 2026

Novi Mikawensi, Akibat Hukum Pencabutan Pasal 114 UU Narkotika oleh KUHP Nasional, <https://dandapala.com>, diakses ulang pada tanggal 22 Januari 2026

Nur Amalia Abbas, KUHP Nasional 2026: Transformasi Hukum Pidana Indonesia, <https://marinews.mahkamahagung.go.id>, diakses ulang pada tanggal 22 Januari 2026

Pengertian Kejaksaan, <https://www.kejaksaan.go.id>, diakses pada tanggal 17 Januari 2026, pukul 12.33 WIB

Sekilas Sejarah dan Problematika Pembahasan RKUHP, <https://reformasikuhp.org>, diakses ulang pada tanggal 22 Januari 2026

Siapa Saja Penyidik Selain Polisi di KUHAP Baru, <https://www.tempo.co>, diakses ulang pada tanggal 22 Januari 2026

Sudiyo, Wakil Kepala Pengadilan Militer I - 04 Palembang, Harmonisasi UU Peradilan Militer Dengan KUHAP Baru, <https://suarabsdk.com>, diakses ulang pada tanggal 22 Januari 2026

Teken PKS dan MoU, Kapolri Tegaskan Sinergi Polri-Kejaksaan Terapkan KUHP-KUHAP Baru, <https://humas.polri.go.id>, diakses ulang pada tanggal 22 Januari 2026

Titania Nurrahim, Perjalanan Panjang RKUHP di Indonesia, <https://indonesiabaik.id>, diakses ulang pada tanggal 22 Januari 2026

Urif Syarifudin, DPR Sahkan KUHAP Baru dalam Rapat Paripurna ke-8, <https://dandapala.com>, diakses ulang pada tanggal 22 Januari 2026

Willa Wahyuni, Mengenal Jenis-Jenis Pidana dalam KUHP Nasional, <https://www.hukumonline.com>, diakses ulang pada tanggal 22 Januari 2026

Willa Wahyuni, Resmi Berlaku! Kenali Jenis-Jenis Tindak Pidana dalam KUHP Nasional, <https://www.hukumonline.com>, diakses ulang pada tanggal 22 Januari 2026

Perundang-Undangan

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pedoman Implementasi E-Berpadu. Jakarta: MA RI.

Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-017/A/JA/07/2014 Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PERJA-039/A/JA/10/2010 Tahun 2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana

Khusus Peraturan Jaksa Agung Nomor PERJA-039/A/JA/10/2010 Tahun 2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus ("Perjagung No. PERJA-039/A/JA/10/2010 Tahun 2010")

Peraturan Jaksa Agung Nomor PERJA-039/A/JA/10/2010 Tahun 2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus;

Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Kejaksaan Agung RI (Perja) Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-IX/2011

Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Undang-Undang;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
Republik Indonesia;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Korupsi;

TENTANG PENULIS



A. Junaedi Karso, Adalah seorang akademisi dan advokat yang lahir di Indramayu, pada 20 September 1975. Pendidikan formalnya S1 FIH Universitas Wirladora Indramayu (lulus tahun 2006), S2 FIP Universitas Pramita Tangerang (lulus tahun 2008), S2 FH Universitas Sumatera Utara Medan (lulus tahun 2020) dan S3 Universitas Satyagama FIP Jakarta (lulus tahun 2017); Pendidikan Non Formal meliputi Mengetik Manual di Mars College Jakarta tahun 1995, Mengetik IBM di Mars College Jakarta tahun 1996, Komputer di Mars College Jakarta tahun 1996, Akutansi Bon A Bon B di PKBMN Jakarta tahun 1997, Beginner Course di PKBMN Jakarta tahun 1996, *Free Elementary* di PKBMN Jakarta tahun 1996, *Elementary One* di PKBMN Jakarta tahun 1996, *Elementary Two* di PKBMN Jakarta tahun 1996, *Intermedite One* di PKBMN Jakarta tahun 1998, *Intermedite Two* di PKBMN Jakarta tahun 1998, *Advance* di PKBMN Jakarta tahun 1998, *Conversation* di Mars College Jakarta tahun 1996, dan Perpajakan di Dirjen Pajak Jakarta tahun 2010.

Pendidikan dan pelatihan yang diikuti antara lain *My Dreams Future Procurement break Through* di LPKN tahun 2020, *Certificate Prourement Contract Legal Expert (CPCLE)* di International Frederation of Procurememt Bar Association (IFPB) tahun 2020, *Certificate Procurement in Perpetice ISO* di Nevi Belanda tahun 2020, *Implementasi System Thinking* dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di LPKN tahun 2020, Pelatihan & Sertifikasi Kompetensi Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam Pengadaan Barang/Jasa di LPKN/ Angkasa Pura/Surveyor Indonesia tahun 2020, *Dinamika Balcklist* dalam Pengadaan Barang/Jasa di LPKN tahun 2020, Diklat Menghadapi Audit & Resiko Hukum Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di LPKN tahun 2020, Pengadaan Barang/Jasa dari berbagai Perspektif di LPKN tahun 2020, Sistem Manajemen Mutu (Understanding and Implementing ISO 9001:2015) di LPKN tahun 2020, Sertifikasi Kompetensi Assesor Pengadaan Barang/Jasa di

LPKN tahun 2020, Sertifikasi Kompetensi Pendampingan KUKM di BNSP tahun 2020, Sertifikasi Kompetensi Pendampingan KUKM di BNSP tahun 2020, Diklat Aspek-Aspek Perancangan Bangunan di LPKN tahun 2020, Diklat Persiapan & Pelaksanaan Pemilihan Jasa Konstruksi di LPKN tahun 2020, Memahami Ilmu Pengadaan & Peluang Mendapatkan Proyek Pemerintah (Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah) di LPKN tahun 2020, Pengalaman Lapangan pada Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi di LPKN tahun 2020, Pengadaan Jasa Konstruksi Pasca Hadirnya Permen PUPR No.14 Tahun 2020 dan SE No. 22 Tahun 2020 di LPKN tahun 2020, Persyaratan Pemilihan & Evaluasi Dokumen Penawaran Pengadaan Jasa Konstruksi sesuai dengan Permen PUPR No. 14 Tahun 2020 di LPKN tahun 2020, Diklat Strategi Pengadaan Tahun 2021 & Penyelesaian Pekerjaan Akhir Tahun 2020 di LPKN tahun 2020, Diklat Pinjam Bendera dalam Pengadaan Perspektif Realita Lapangan & Ketentuan Per-UU di LPKN tahun 2020, Pelatihan Pengadaan Barang & Jasa Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKAP) di LPKN tahun 2020, Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 *Awareness, Understanding & Implementing Quality Management System* di LPKN tahun 2020, Diklat Persiapan & Pelaksanaan Pemilihan Jasa Konstruksi di LPKN tahun 2020, dan Pengadaan Jasa Konstruksi Pasca Hadirnya Permen PUPR No.14 Tahun 2020 dan SE No. 22 Tahun 2020 di LPKN tahun 2020, Persyaratan Pemilihan & Evaluasi Dokumen Penawaran Pengadaan Jasa Konstruksi sesuai dengan Permen PUPR No. 14 Tahun 2020 di LPKN tahun 2020, *New Normal* Penyelenggaraan Jasa Konstruksi “*How to Perform While Transform*” di LPKN tahun 2020, Pemberian Kesempatan dengan Perpanjangan Masa Kontrak di LPKN tahun 2020, Strategi BUMN menuju Transformasi Pengadaan Barang/Jasa di LPKN tahun 2020, Meningkatkan Kualitas Pengadaan melalui *Quality Assurance* dalam Era Industri 5.0 di LPKN tahun 2020, Pengadaam Mutu Konstruksi di LPKN tahun 2020, Pelaku Pengadaan: Konsep Pengenalan Sederhns Perpres No.16/2018 bagi PNS di LPKN tahun 2020, Perijinan Terintegrasi (OSS) pada Pengadaan Barang & Jasa di LPKN tahun 2020, Jerat & Celah Hukum Pengadaan dalam Keadaan Darurat di LPKN tahun 2020,

Pembekalan Teknis untuk Pejabat Pengadaan Barja di LPKN tahun 2020, SMK 3 Konstruksi di LPKN-BNSP tahun 2020, di LPKN tahun 2020, NNLP Practitioner di LPKN-Neo NNLP tahun 2020, Master NNLP Practitioner di LPKN-Neo NNLP tahun 2021, Pembekalan Teknis bagi PPK dalam Rangka Pelaksanaan Pengadaan TA 2020 & Kompetensi Pejabat PPK di LPKN tahun 2021, *Training of Trainer* (TOT) di BNSP tahun 2020, Penerapan Kontrak Kerja Konstruksi di BNSP tahun 2020, Persiapan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa di BNSP tahun 2020, *Training of Trainer* (TOT) Internasional di IPB-KAN tahun 2021, *Training of Trainer* (TOT) BNSP di LPKN-Pelatinas tahun 2021, Pengelolaan Lembaga Pelatihan BNSP di LPKN-Pelatinas tahun 2021, Metodologi Pelatihan Jarak Jauh BNSP di LPKN-Pelatinas tahun 2021, *Certified International Quantitative Research* (CIQnR) di Quantum HRM International_KAN tahun 2021, *Certified International Qualitative Research* (CIQaR) di Quantum HRM International KAN tahun 2021.

Karya yang berupa buku adalah sebagai berikut : Buku Ajar Dasar dasar Ilmu Sosial; Buku Ajar Dasar Dasar Ilmu Politik; Buku Ajar Pemerintah Nasional; Buku Ajar Hukum Tata Pemerintahan Versi Kedua; Buku Ajar Antikorupsi; Buku Ajar Master Pendidikan Kewarganegaraan; Buku Ajar Politik Pertahanan dan Keamanan; Buku Ajar Politik Hukum Indonesia; Buku Ajar Hukum Tata Pemerintahan; Buku Ajar Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah; Buku Ajar Good Governance; Buku Aja Etika Politik Pemerintahan; Buku Ajar Ekonomi Politik; Buku Ajar E Government; Buku Ajar Sistem Sosial Politik Indonesia; Buku Ajar Sektor Pelayanan Publik di Indonesia; Buku Ajar Konstitusi dan Kelembagaan; Buku Ajar Kebijakan Sektor Publik; Buku Ajar Manajemen Konflik; Buku Ajar Negosiasi Politik di Indonesia; Buku Ajar Media dan Demokrasi di Indonesia; Buku Ajar Pendidikan Pancasila; Buku Ajar Pendidikan Kewarganegaraan; Buku Ajar Hukum Administrasi Negara; Buku Ajar Komunikasi Pemerintahan di Indonesia; Buku Ajar Pendidikan Anti Korupsi Bagi Aparatur Desa Indonesia; *Implementation Of Good Corporate Governance To Secure Assets n State Owned Palm Oil Plantation Companies And Privately Owned Companies In Indonesia*; Buku Kinerja Kejaksaan Agung Kolaboras Penegak

Hukum Dalam Memperbaiki Wajah Pemberantasan Korupsi Di Indonesia; E Commerce Datang Warung Tradisional Hilang; Mengukur Peta Pertarungan Kekuatan Politik Di Pulau Jawa Netralitas Apartur Negara Pada Pilpres 2024 Ketimpangan Ekonomi Jawa Barat Dibawah Kepemimpinan Ridwan Kamil; Perang Israel Palestina Peran Serta Indonesia Dalam Mewujudkan Kemerdekaan Palestina Kontribusi Bantuan Kemanusiaan Muhammadiyah Aksi Bela Palestina Public Figure Internasional and Nasional; Pembangunan Proyek Food Estate Pemenuhan Kebutuhan Pangan Indonesia Antara Untung and Rugi; Menanti Dasyatnya Bunyi Ketukan Palu Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Dalam Membatalkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 PUU XXI 2023 Soal Syarat Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2024; Penerapan Good Corporate Governance Untuk Pengamanan Aset Pada Perusahaan Kebun Sawit Di Perusahaan Milik Negara Bumn Perusahaan Swasta Di Indonesia; Pengakuan Negara Terhadap Kedudukan Hukum Adat dalam UUD 1945; Sekilas Info Indonesia Berduka Akibat Ulah Firli Bahur Panglima Perang KPK Di Indonesia Sengkarut Di Pusaran Internal Dijerat Pasal Dugaan Pemasaran Terhadap Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo; Waspada Jebakan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Tiga Periode; Kupas Tuntas Pro Kontra Keputusan Pengadilan Jakarta Pusat Terkait Penundaan Pemilu 2024 Meraung Penundaan Pemilihan Presiden Tahun 2024 Tetap Dilaksanakan Berdasarkan Konstitusi Indonesia; Terwujudnya Indonesia Menuju Negara Maritim Dunia Yang Tangguh; Seputar Lintas Kejahatan Realita Antara and Kamufalse Pidana Berdasarkan Undang Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik; Polri di bawah Kementerian dalam Negeri antara Politik atau Pelemahan Institusi; Perencanaan Strategik dalam Menyiapkan Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Daerah yang Profesional dalam Mendukung Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Era Digital 40; Peranan dan Upaya Badan Narkotika Nasional BNN dalam Pemberantasan Pencegahan Kejahatan Narkotika di Indonesia; Peran Fungsi Kedudukan Kepolisian dalam pemerintahan penegakan hukum dan kolaborasi pemberantasan

Korupsi di Indonesia; Risk Manajemen Good Corporate Governance Pengamanan terhadap pencurian TBS di Perkebunan berdasarkan UU Perkebunan No 39 Tahun 2014; Peranan dan Upaya Badan Narkotika Nasional BNN dalam Pemberantasan Pencegahan Kejahatan Narkotika di Indonesia; Peran Fungsi Kedudukan Kepolisian dalam pemerintahan penegakan hukum dan kolaborasi pemberantasan Korupsi di Indonesia; Pengaruh Kepemimpinan Profesionalisme Dan Komitmen Anggota Polri Terhadap Kinerja Divisi Propam Polri; Pengaruh Implementasi Manajemen Pemerintahan Terhadap Kinerja Peran dan Fungsi Camat di Indonesia; Pengaruh Implementasi Kebijakan Pemda terhadap perkawinan antar warga Di Dalam Pembangunan Perekonomian Sosial Budaya Di Kabupaten Indramayu; Pengantar Tata Hukum Pemerintahan and Dasar dasar Tata Negara di Indonesia; Penerapan Good Corporate Governanance GCG Untuk Pengamanan Aset Perusahaan; Pembangunan transportasi tol laut dalam mewujudkan Indonesia yang makmur menuju poros maritim dunia; Perkawinan campuran dan Kesejahteraan di Kabupaten Indramayu Jawa Barat; Membangun kualitas pelayanan administrasi pertanahan studi pelayanan administrasi pertanahan di Kecamatan Anjatan Indramayu; Lintasan Pandangan Mata Yang Remang-Remang Tentang Dilema Indonesia Lumbung Sawit Dunia; Legalitas Perkawinan Antar Warga Negara Di Kecamatan Anjatan Indramayu; Ketegasan Polri and Penegakan Hukum dalam Membuka Tabir Hitam Kekejaman Ferdys Sambo; Kereta Api Trans Sulawesi antara Pengguna Transportasi and Ekonomi Masyarakat; Implementasi Analisis Perumusan Kebijakan Publik Kunci Utama Terselenggaranya Kesejahteraan Di Indonesia; Implementasi KSOP sebagai Kepala Pemerintahan di Laut; Hukuman Mati Bagi Koruptor Penghisap Bantuan Sosial Untuk Rakyat Miskin Dimasa Covid 19; Gagasan Perubahan Perizinan Transportasi Laut; Dasyatnya Money Politik Pilkades Pilwu di Indramayu; inggris pusat aktivitas judi online terbesar di dunia versus Indonesia terpapar; penerapan e government eoffice sistem perencanaan pembangunan di daerah; Sumbangsih Smart E Government

Artificial Intelligence Di Indonesia; RUU TNI Anak Kandung Rakyat Rakhmat Bagi Indonesia Solus Populis Suprema Lex Esto; RUU Polri Rakhmat Bagi Indonesia Solus Populis Suprema Lex Esto; Revisi Undang Undang Tni Polri Vs Penempatan Jabatan Sipil Di Indonesia; Sekilas Pandangan Lahirnya Palmco Sebagai Produsen Terbesar Kelapa Sawit Dunia; Menyongsong Kota Metropolitan: Teori dan Praktik Pengembangan Kawasan dan Pertumbuhan Ekonomi; Tendensi Politik Regional 2024: Money Politics, Police Power Politics, and Local Democracy; Revisi Undang-Undang TNI Polri VS Penempatan Jabatan Sipil di Indonesia; Sekilas Pandangan Lahirnya PalmCo sebagai Produsen Terbesar Kelapa Sawit Dunia; Kupas Tuntas Parliamentary & Presidential Threshold Di Indonesia: Antara Perspektif Positif & Negatif; Dampak Presidential Threshold, Problematika & Solusinya dalam Pemilu; di Indonesia; Pensertifikatan Tanah di Indonesia di antara Kendala dan Problematika : Berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap; Ambang Batas Parlemen dalam Pemilu Legislatif Tahun 2019-2024 versus Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 60/PUU-XXII/2024; Presidential Threshold di Indonesia : Antara Positif, Negatif & Solutif; Parlemetary Threshold di Indonesia antara Positif & Negatif; Pemagaran Laut Tangerang, Kedaulatan Negara Versus Potensi Laut & Sejarah Maritim Indonesia; Tragedi & Dampak Kerugian Kebakaran di Los Angeles Amerika Serikat; Bulan Ramadhan antara Libur Sekolah & Sejarahnya di Indonesia; Ketokan Palu MK Mengubah Jalan Presidential Threshold di Indonesia; Program Makan Bergizi Gratis, Presiden Prabowo Subianto Menuju Indonesia Emas 2045; Presiden Prabowo Jabatan & Kekuasaan Milik Rakyat Berantas Korupsi Hingga ke Akar-Akarnya; Kewenangan Kejaksaan Superbody, Membunuh Kewenangan Polri-KPK; Program Pendidikan Deep Learning, Penerapan Artificial Intelligence di Indonesia; Sekilas Program Astacita Prabowo di Sektor Pertanian; Gebrakan Sang Jenderal Genius Prabowo di Sektor Pendidikan, Kesehatan dan Pertahanan; Danantara-

Indonesia Ku Siap Bergerak Menuju Kesejahteraan & Keadilan Ekonomi Rakyat Indonesia; Berkolaborasilah APH dalam Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Astacita; Menyongsong Kota Metropolitan, Teori dan Praktik Pengembangan Kawasan dan Pertumbuhan Ekonomi; Nilai Stategis Indramayu di Antara Pengembangan Kawasan Rebana; Diamputasinya Kewenangan Polri Dalam Penyidikan, Ditangan Kejaksaan Sebagai Dominus Litis; Kenaikan Pajak PPN 12% Dampak & Kemakmuran, Keadilan Rakyat Indonesia; Manfaat Asuransi Syariah & Perkembangannya di Indonesia; Program Makan Bergizi Gratis Presiden Prabowo Subianto Menuju Indonesia Emas 2045; Investasi Emas dalam Islam & Prediksi Jayanya Emas di Tahun 2025; Kemilau Harga Emas Terkini di Indonesia & Dunia; Ketukan Palu Hakim antara Keadilan & Godaan Kebutuhan Hidup; *Manfaat Asuransi Syariah & Perkembangannya di Indonesia*; Membedah Perjuangan Kartini-Kartini Muslim Indonesia, Dunia, Dan Peranannya; Pemagaran Laut Tangerang, Kedaulatan Negara Versus Potensi Laut & Sejarah Maritim Indonesia; Peralihan Hak Guna Usaha, Hak Adat Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996; Pinjaman Online; Lintah Darat Moderen di Era Artificial Intelligence; Sekilas Tindak Pidana Korupsi Kredit Macet Perbankan dan Dampaknya bagi Perekonomian di Indonesia (Editor); Seni & Sejarah Mudik Lebaran di Indonesia; Sentuhan Lembut Prabowo Subianto Meluluhkan Dasyatnya Palu Godam Tarif Donald Trump; UU TNI Rahmat & Barokah bagi NKRI; Gebrakan sang Jendral Genius Prabowo Disektor Pendidikan, Kesehatan dan Pertahanan; Program Pendidikan *Deep Learning*, Penerapan *Artificial Intelligence* di Indonesia; Penyelesaian Sengketa secara Mediasi terhadap Kredit Macet melalui Proses Eksekusi; Hak; Tanggungan atas Tanah dalam Sistem Peradilan Perdata. (Editor); Peralihan Hak Guna Usaha, Hak Adat Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria (Editor); Sekolah Rakyat Gratis, Program Astacita Sang General Prabowo Menuju Indonesia Emas 2045; Dampak Perang Tarif As-Tiongkok Terhadap Indonesia, Jurus Nan Sakti-

Solutif Sang General Genius Prabowo Dalam Menghadapi Tarif Trump”; Keputusan MK Nomor 3/PUU-XXIII/2025, Implementasi Astacita cita Presien Prabowo; Keputusan Mk Nomor: 3/PUU-XXIII/2025 Tentang SD-SMP Negeri Dan Swasta Gratis Sesuai Dengan Astacita Prabowo; Astacita Presiden Prabowo Meningkatkan SDM Solusi Untuk Menghadapi Tingginya Biaya Kuliah Diperguruan Tinggi Menuju Indonesia Emas 2045; TNI Anak Kandung Rakyat, Menjaga Keamanan Kejaksaaan Solus Populus Supreme Lex Asto & Astacita Prabowo; Outsourcing Dalam Perspektif Pancasila, & Uu Cipta Kerja, Solusi Terbaik Jangan Dibubarkan Demi Anak Bangsa; WASPADA Pidana TIPIKOR bagi Penyalahgunaan Penggunaan Dana BOS di Lingkungan Sekolah; Pemblokiran Rekening Dorman oleh PPAK: Jurus Antisipasi Memotong Rantai Mengakarnya Judol di Indonesia; Pengeluaran Subsidi BBM dan Listrik Melambung, Membenani APBN Indonesia Versus Pengembangan Energi Terbarukan; Pengeluaran Subsidi BBM Dan Listrik Melambung, Membenani Apbn Indonesia Versus Pengembangan Energi Terbarukan; Himpitan Ekonomi Dimasa Pandemi, Penyebab Meningkatnya Pekerja Anak sebagai Permasalahan Global Berdampak pada Lost Learning Pendidikan Mengancam Indonesia Emas 2045; Konservasi Proyek Energi Terbarukan Panas Bumi yang Belum Tergarap Menuju Pemulihan Ekonomi Indonesia; Perang Thailand- Kamboja, Perananan Asean dan Indonesia Versus Menjamurnya Surga Judi dan Ancaman Tarif Trump kepada Thailand-Kamboja; Polemik Keputusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang Pemisahan Pemilu Daerah dan Nasional Versus RUU MK; Buku_Amnesti Hasto, Abolisi Tom Lembong Hak Prerogatif Presiden Sudah Sesuai Kontitusi & Sejarahnya Di Indonesia; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Tonggak Awal Penegakan Hukum di Indonesia; Tanah Nganggur Dua Tahun Diambil Negara Bertentangan dengan Konstitusi vs Konglomerat Pemilik Lahan Terbesar.

Untuk berkorespondensi bisa menghubungi nomor kontak +62813 2417 8569 atau email Bintang.lyatiara66@gmail.com, juga bisa berkunjung di Ilmu Pemerintahan FISIP. Universitas Muhammadiyah Makassar, Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar.

LAMPIRAN



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan hukum pidana nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa, perlu disusun hukum pidana nasional untuk mengganti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana warisan pemerintah kolonial Hindia Belanda;
- b. bahwa hukum pidana nasional tersebut harus disesuaikan dengan politik hukum, keadaan, dan perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang bertujuan menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
- c. bahwa materi hukum pidana nasional juga harus mengatur keseimbangan antara kepentingan umum atau negara dan kepentingan individu, antara perlindungan terhadap pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana, antara unsur perbuatan dan sikap batin, antara kepastian hukum dan keadilan, antara hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat, antara nilai nasional dan nilai universal, serta antara hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia;

d. bahwa . . .

www.peraturan.go.id



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

- d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Mengingat : Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **UNDANG-UNDANG TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PIDANA.**

**BUKU KESATU
ATURAN UMUM**

**BAB I
RUANG LINGKUP BERLAKUNYA KETENTUAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN PIDANA**

**Bagian Kesatu
Menurut Waktu**

Pasal 1

- (1) Tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan/atau tindakan, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.
- (2) Dalam menetapkan adanya Tindak Pidana dilarang digunakan analogi.

Pasal 2 . . .